- TAX AUDITING
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

EVALUASI ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BUDURAN DELTA PURNAMA SIDOARJO

SKRIPSI

DIAJUKAN DALAM MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

A 96 5
2

DIAJUKAN OLEH

DWIE PRASETYA

No. Pokok : 040338236

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

SKRIPSI

EVALUASI ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BUDURAN DELTA PURNAMA SIDOARJO

DIAJUKAN OLEH:

DWIE PRASETYA

No. Pokok : 040338236

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. H. Heru Tjaraka, MSi, Ak **TANGGAL** 10-3-2006
NIP : 132 054 304

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,

Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak **TANGGAL** 15-3-2006
NIP : 131 287 542

Surabaya, 23-1-2006

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak

NIP: 032.054.304

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdullilahirabil 'alamin, tiada kata yang patut terucapakan sebagai luapan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah begitu baik dan senantiasa dalam limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul : **"Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Pajak Terhadap Piutang Yang Tidak Tertagih dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo".**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini guna memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Penulis sadar bahwa keberhasilan penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah dengan penuh kesabaran telah membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini, dengan tulus dan sepenuh hati penulis ingin mengucapakan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Ec. H. Karyadi Mintaroem, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga.

3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan doa untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas ilmu yang telah diberikan, Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi atas pelayanan yang telah diberikan selama penulis berkuliah.
5. Ibu Misti yang memberikan penjelasan dan data-data mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama.
7. Keluarga penulis yang dengan penuh kasih sayang dan tiada henti untuk memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis selama ini.
8. Teman-teman satu angkatan S-1 Akuntansi Alih Jenjang yang selalu bersama-sama dan memberikan dukungan. Hardi, Tuban, Lupus, Dwiri, Tante Lisa, Budi Narji, Medi, Iwan "Manajemen".
9. Mas Heru, terima kasih atas fotokopi Undang-undangnya.
10. Teman-teman yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini antara lain Deyong yang bersedia menjadi penasehat bersama Wawan, Rendra von Qodir.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan di TAX "99 dan Bachelor: Rahmad, Lawas (kapan mulai ?), Endro & Deny, Sinyo, Viktor, Om Jemblung, Poo, Evi, Basir *(Anime Addict)*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini. Dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surabaya, Januari 2006

Penulis

ABSTRAK

Piutang usaha *(accounts receivable)* ialah hak setiap perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas dan merupakan salah satu bagian penting dari aktiva yang tertera pada neraca suatu perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya jarang sekali ditemui perusahaan yang mampu menagih semua piutangnya kepada debitur. Kadang kala jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ini cukup material sehingga akhirnya menyebabkan penurunan keuntungan dalam tingkatan yang signifikan juga. Di dalam praktik akuntansi komersil mengenal dua metode untuk melakukan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penghapusan dengan menggunakan cadangan piutang. Kreditur tersebut akan menghapus piutang dengan cara menjurnalnya dengan akun beban piutang tidak tertagih (*bad-dedt cxpense)* yang nantinya akan menjadi beban, yang tentu saja mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Tetapi dalam praktik akuntansi fiskal (pajak) tidak memperkenankan adanya pos (akun) cadangan piutang dan mengurangkannya dari penghasilan sebagai biaya, kecuali untuk kreditur yang bergerak pada usaha perbankan.

Penelitian dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada nasabah. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan, maka semakin besar pula resiko tidak tertagihnya kredit atau piutang tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak yang dilakukan oleh BPR Buduran Delta Purnama terhadap piutang yang tidak tertagih dan pengaruh dari tidak tertagihnya piutang tersebut terhadap laporan keuangan fiskal BPR Buduran Delta Purnama.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menjelaskan secara sistematik, faktual, tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku secara umum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa peraturan perpajakan memperkenankan perusahaan yang bergerak dalam usaha perbankan diperkenankan menggunakan dua metode penghapusan piutang sekaligus. BPR Buduran Delta Purnama melakukan pencatatan transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan sehingga hal ini akan membuat pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan akan mengalami kesulitan untuk membaca laporan keuangan tersebut. Dalam memperhitungkan jumlah dana cadangan piutang yang tidak tertagih, BPR Buduran Delta Purnama masih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.01/1998. Laporan laba rugi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwa laba bersih sebelum pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 204/KMK.04/2000 memberikan hasil yang lebih besar daripada yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.01/1998. Sehingga perbedaan tersebut akan berdampak pada PPh terutang.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Piutang usaha, metode penghapusan piutang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB 1 : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4. Manfaat Penelitian 4

1.5. Sistematika Skripsi 4

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan 6

2.2. Pengertian Laporan Keuangan 9

2.2.1. Menurut Akuntansi 9

2.2.2. Menurut Perpajakan 10

2.3. Pengertian Bank 12

2.3.1. Karakteristik Bank 12

2.3.2. Jenis-jenis Bank 13

2.3.3. Bank Perkreditan Rakyat 14

2.4. Perkreditan Bank 15

2.4.1. Arti, Fungsi, Tujuan dan Jenis Kredit 15

2.4.2. Tingkat Suku Bunga Kredit 19

2.5. Laporan Keuangan Bank 20

2.6. Pengertian Piutang 21

2.7. Nilai Piutang di Neraca 22

2.8. Metode Penghapusan Piutang 23

2.9. Ketentuan dana Cadangan Menurut Perpajakan 24

2.10. Perlakuan Akuntansi untuk Piutang 25

2.10.1. Berdasarkan Metode Penyisihan 25

2.10.2. Berdasarkan Metode Penghapusan Langsung 26

2.11. Penelitian Sebelumnya 27

BAB 3 : METODE PENELITIAN 28

3.1. Pendekatan Penelitian 28

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 29

3.3. Sumber Data 29

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 30

3.5. Teknik Analisis 32

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 34

4.1. Sejarah PT BPR Buduran Delta Purnama 34

4.1.1. Bentuk Badan Hukum 35

4.1.2. Struktur Organisasi Bank 35

4.1.4. Job Description BPR Buduran Delta Purnama 37

4.1.5 Lokasi BPR Buduran Delta Purnama 40

4.1.6. Visi, Misi, dan Tujuan BPR Buduran Delta Purnama 41

4.1.7. Jasa Yang Diberikan BPR Buduran Delta Purnama 42

4.1.8. Kredit Yang Diberikan BPR Buduran Delta Purnama 42

4.1.9. Tingkat Suku Bunga Kredit 43

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 48

4.2.1. Kebijakan Akuntansi BPR Buduran Delta Purnama 48

4.3. Pembahasan 51

4.3.1. Penerapan Akuntansi Pajak Terhadap Piutang Yang Tidak Tertagih 51

4.3.2. Besar Dana Penyisihan Penghapusan Kredit Yang Tidak Tertagih 56

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 73

5.1. Simpulan 73

5.2. Saran 74

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tingkat Suku Bunga Kredit 43

Tabel 4.2. Neraca BPR Delta Purnama 44

Tabel 4.3. Laporan Laba Rugi BPR Buduran Delta Purnama 46

Tabel 4.4. Daftar Rincian Kredit BPR Buduran Delta Purnama 53

Tabel 4.5. Pembentukan Dana Penyisihan Piutang yang Tidak Tertagih Tahun 2004 65

Tabel 4.6. Laporan Laba Rugi BPR Buduran Delta Purnama 67

Tabel 4.7. Perhitungan PPh Terhutang 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data 33

Gambar 4.1. Stuktur Organisasi BPR Buduran Delta Purnama 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rekening-Rekening Administrasi

Lampiran II Daftar Rincian Antar Bank Aktiva

Lampiran III Daftar Rincian Rupa-rupa Aktiva

Lampiran IV Daftar Rincian Tabungan

Lampiran V Daftar Rincian Deposito Berjangka

Lampiran VI Daftar Rincian Antar Bank Pasiva

Lampiran VII Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, semakin banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan baru di Indonesia, baik perusahaan manufaktur, perusahaan barang maupun perusahaan jasa. Agar dapat menguasai pasar, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk melakukan persaingan dengan cara memperbanyak tingkat produksinya.

Untuk dapat memperbanyak tingkat produksinya, perusahaan dituntut agar mempunyai modal yang lebih besar dari sebelumnya. Dimana modal ini dapat diperoleh perusahaan dari para kreditur.

Namun dengan kondisi ekonomi yang ada pada saat ini, dimana nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang semakin melemah menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba yang tentu saja akan berdampak terhadap arus kas perusahaan. Hal ini membuat beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya terhadap kreditur. Dengan kondisi yang dialami oleh perusahaan atau para debitur ini, secara tidak langsung para kreditur terkena dampaknya. Para kreditur terpaksa untuk melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dari para debitur.

Piutang usaha (*accounts receivable)* ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas dan merupakan salah satu bagian penting dari aktiva yang tertera pada neraca pada suatu perusahaan. Akan tetapi

pada kenyataannya jarang sekali ditemui perusahaan yang mampu menagih semua piutangnya pada debitur. Kadang kala jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ini cukup material sehingga akhirnya menyebabkan penurunan keuntungan dalam tingkatan yang signifikan juga.

Di dalam praktik akuntansi komersil mengenal dua metode untuk melakukan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penghapusan dengan menggunakan cadangan piutang. Kreditur tersebut akan menghapus piutang dengan cara menjurnalnya dengan akun beban piutang tidak tertagih (*bad-dedt expense)* yang nantinya akan menjadi beban, yang tentu saja mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Tetapi dalam praktik akuntansi fiskal (pajak) tidak memperkenankan adanya pos (akun) cadangan piutang dan mengurangkannya dari penghasilan sebagai biaya, kecuali untuk kreditur yang bergerak pada usaha perbankan.

Bank diperkenankan untuk membentuk cadangan piutang tidak tertagih untuk dikurangkan sebagai biaya. Pertimbangan yang dipakai dalam pemberian izin tersebut adalah karena usaha bank sudah sewajarnya untuk membentuk atau memupuk dana cadangan guna menutup resiko yang dihadapi dalam melakukan usaha. Ketentuan ini tertera dalam Kep. MenKeu. No. 235/KMK.01/1998/, tanggal 14 April 1998 yang telah diubah dengan Kep MenKeu No. 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian yang akan dilakukan mencoba membahas beberapa masalah yang dibatasi sebagai berikut : "Bagaimanakah evaluasi atas penerapan akuntansi pajak terhadap piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo?"

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara penerapan akuntansi pajak terhadap piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui evaluasi penerapan akuntansi pajak terhadap piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih terhadap laporan keuangan fiskal pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian bagi Penulis. Menambah wawasan dan gambaran bagi penulis tentang penerapan perpajakan yang sesungguhnya, khususnya

akuntansi pajak terhadap piutang yang tidak dapat tertagih pada Wajib Pajak yang bergerak di bidang perbankan.

2. Manfaat penelitian bagi subjek penelitian. Memberi masukan mengenai perlakuan piutang yang tidak tertagih kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan piutang.
3. Manfaat penelitian bagi pembaca. Sebagai bahan perbandingan dan referensi ilmiah tentang ilmu perpajakan, khususnya tentang praktik akuntansi pajak terhadap piutang yang tidak dapat ditagih pada Wajib Pajak yang bergerak di bidang perbankan.
4. Manfaat penelitian bagi almamater. Memperkaya dan menambah khazanah perbendaharaan katya ilmiah bermutu yang dimiliki oleh Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Ekonomi.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran dari penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menyajikan kerangka umum materi yang terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab 2 : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan tema skripsi dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu.

Bab 3 : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis penelitian.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang membandingkan antara hasil penelitian dan teori yang ada.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan ganda, yaitu penerimaan *(revenue, budgetary)* dan pengaturan *(regulatory)*. Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpul dana *(money making machine)* untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Dari pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas *(adequacy)* dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.

Dalam perekonomian terdapat faktor-faktor produksi, seperti modal (investasi), sumber daya alam, tenaga, dan manajemen. Untuk mempengaruhi alokasi optimal sumber daya dan dana itu, kebijakan perpajakan *(tax policy)* dapat diarahkan pada sikap netral (tidak mempengaruhi alokasi dan menyerahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar) atau cenderung diarahkan untuk mempengaruhi alokasi. Misalnya, kepada suatu sektor tertentu (pemerintah mengendalikan sektor pemroduksi barang dengan regulasi pajak). Pada fungsi distribusi, kebijakan pajak diarahkan untuk mempengaruhi penyebaran (pemusatan atau pemerataan) pemilikan atau penguasaan faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan (pendapatan dan kekayaan). Melalui politik perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi stabilisasi ekonomi dengan tingkat

pendayagunaan tertentu, sumber daya manusia, stabilisasi harga, dan tingkat inflasi.

Dalam pengertiannya sering kita mendengar akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mengolah data dan menyajikan informasi kepada para pihak yang membutuhkannya. Para pihak itu bisa pemerintah, calon investor, calon kreditor, investor, kreditor, lembaga pemerintah, biro pusat statistik, pengamat dan sebagainya. Disamping para pihak yang merupakan pihak luar/eksternal, pihak manajemen internal juga membutuhkan informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya berupa laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Laporan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang di negara kita dipakai sebagai pedoman untuk menjadi ukuran apakah suatu laporan keuangan sudah sesuai dengan standar atau belum. Karenanya laporan keuangan yang diaudit akan diberi pendapat dan pendapat itu bisa pendapat wajar tanpa syarat atau wajar dengan syarat atau bahkan dapat terjadi akuntan menolak memberikan pendapat. Dengan demikian dalam laporan keuangan komersial yang menjadi pedoman dan rujukan ialah standar akuntansi keuangan yaitu suatu standar yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan bukan oleh pemerintah.

Akuntansi pajak, dilain pihak merupakan proses yang terintegrasi dengan akuntansi komersial yang dibuat supaya dapat menghasilkan *taxable income*. *Taxable income* dibuat dan dilaporkan dalam bentuk laporan sebagai basis pemenuhan undng-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang (secara

teoritis) mengacu pada keadilan, ketertiban administrasi, obyektivitas, dan kepastian hukum.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mencolok antara laporan keuangan komersial (menurut akuntansi) dengan laporan keuangan fiskal (menurut pajak). Oleh para Wajib Pajak perbedaan tujuan antara laporan menurut pajak dengan laporan menurut akuntansi harap dipahami dan dijadikan bahan pemikiran supaya karakteristik kualitatif yang melekat dalam dua bentuk laporan tersebut tidak dicampur adukkan.

Akuntansi perpajakan, secara prinsip terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya. Perlakuan itu semula juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian ketentuan itu dipindahkan ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Namun, perkecualian dari konsep-konsep dasar itu berlaku apabila ketentuan pajak mengatur lain.

2.2. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi dan kemajuan perusahaan dari sudut keuangan. Laporan keuangan akan menunjukkan sampai seberapa efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai perusahaan.

2.2.1. Menurut Akuntansi

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI, 2001: par 5) disebutkan bahwa :

> " Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumbersumber daya yang dipercaya kepada mereka."

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubaham posisi keuangan, catatan dan laporan lain materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat, dan obyektif (Lumbantoruan, 1996: 53). Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan baik untuk pihak internal (manajemen) maupun pihak eksternal. Pemakai eksternal laporan

keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat.

2.2.2. Menurut Perpajakan

Ketentuan pembukuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada prinsipnya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Yang dimaksud pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan wajib disimpan di Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban penyimpanan tersebut bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah di tempat kegiatan atau tempat tinggal, dan bagi Wajib Pajak badan adalah di tempat kedudukan

Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 4 ayat (4) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang meminta Wajib Pajak badan untuk wajib menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak orang pibadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan.

Konsep dasar akuntansi umumnya berlaku terhadap akuntansi perpajakan, sehingga ciri kualitatif informasi pelaporan perpajakan pada umumnya sama dengan ciri kualitatif informasi keuangan. Ciri-ciri itu meliputi relevan, dapat dipahami, keandalan, dan dapat dipercaya. Tetapi ada beberapa sifat dan keterbatasan laporan keuangan komersial yang relevan terhadap laporan keuangan fiskal, antara lain (a) laporan keuangan bersifat historis, (b) proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan, (c) lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi), (d) laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi/peristiwa (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya), (e) terdapatnya alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarWajib Pajak, dan (f) informasi

kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan (Gunadi, 1997: 14).

2.3. Pengertian Bank

Menurut PSAK No. 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan *(financial intermediary)* antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana *(surplus unit)* dengan pihak-pihak yang memerlukan dana *(defisit unit)*, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

2.3.1 Karakteristik Bank

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran.di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan oleh para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah

yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan kepada bank.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai persyaratan atau ketentuan bagi industri perbankan sejak permohonan ijin pada awal pendiriannya, persyaratan calon pengelola serta ketentuan-ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation)* dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

2.3.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Suyatno (2003:4) dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 5 tahun 1992 tentang perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari:

a. **Bank Umum,** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.
b. **Bank Perkreditan Rakyat,** adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

1. Perusahaan Perseroan (Persero),
2. Perusahaan Daerah (PD),
3. Koperasi,

4. Perseroan Terbatas (PT).

Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

1. Perusahaan Daerah (PD),
2. Koperasi,
3. Perseroan Terbatas (PT), atau
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.3.3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan, keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1988 yang dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/MK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Nomor 1238/KMK.00/1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan perubahan-perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan dimaksud terutama mencakup status, kegiatan usaha, dan tata cara pendirian BPR.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran.
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
c. Melakukan penyertaan modal.
d. Melakukan usaha perasuransian.
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992.

2.4. Perkreditan Bank

2.4.1. Arti, Fungsi, Tujuan, dan Jenis Kredit.

Menurut Suyatno (2003:12) kredit berasal dari bahasa italia *credere* yang artinya kepercayaan (*truth* atau *faith*), yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, pasal 1 (12)).

Fungsi kredit antara lain:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkat daya guna barang dan uang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara berpikir atau cara bertidak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Tujuan penyaluran kredit antara lain:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Jenis kredit dibedakan berdasarkan:

a) Berdasarkan tujuan

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama kelurganya, seperti kredit rumah
2. Kredit modal kerja ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur
3. Kredit investasi ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam waktu yang relatif lama.

b) Berdasarkan jangka waktu:

1. Kredit jangka pendek ialah kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun

c) Berdasarkan macamnya:

1. Kredit aksep, yaitu kredit yang diberikan bank pada hakekatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kreditnya.
2. Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.

3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red cluase* L/C.

d) Berdasarkan sektor perekonomian:

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
3. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan
4. Kredit export-import ialah kredit yang disalurkan kepada exsportir dan atau importir
5. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

e) Berdasarkan jaminan

1. Kredit angunan orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan orang terhadap debitur yang bersangkutan
2. Kredit agunan efek ialah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek atau surat-surat berharga
3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap , barang bergerak, dan logam mulia.
4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi seperti *letter of credit*

f) Berdasarkan golongan ekonomi

1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah yaitu kekayaannya maksimum sebesar Rp 600 juta
2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar

g) Berdasarkan penarikan dan pelunasan:

1. Kredit rekening koran adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya.

2.4.2. Tingkat Suku Bunga Kredit

Suku bunga adalah 'harga' kredit yang akan ditawarkan kepada debitur. Beberapa faktor penentu tingkat bunga kredit adalah:

1. Jangka waktu ikatan kredit.
2. Kualitas jaminan kredit (tingkat resiko kredit)
3. Reoutasi perusahaan berdasarkan status usaha dan keuangan debitur.
4. Produk yang kompetitif
5. Hubungan debitur dengan bank
6. Perkembangan kondisi pasar

Setelah tercapai kata sepakat antara pihak bank dengan debitur atas tingkat bunga kredit, ada beberapa cara perhitungan bunga kredit, antara lain:

1. *Sliding rate,* yaitu pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan kebulan.
2. *Flat rate,* yaitu pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode yang lainnya. Walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.
3. *Floating rate,* yaitu merupakan cara penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan unatuk satu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada dipasar uang (*money market rate*)

2.5. Laporan Keuangan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 31, laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban dan komitmen serta kontijensi dalam valuta asing, harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal laporan. Untuk modal yang disetor dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs konvensi Bank Indonesia pada saat modal tersebut disetor (*historical rate).* Kurs tengah yaitu kurs jual ditambah kurs beli Bank Indonesia dibagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs jual ditambah kurs beli bank yang bersangkutan dibagi dua.

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan bank terdiri atas :

a. Neraca

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi

c. Laporan Laba Rugi

d. Laporan Arus Kas

e. Catatan atas Laporan Keuangan

2.6. Pengertian Piutang

Menurut Lumbantoruan (1996;164), Piutang (*accounts receivable)* ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Untuk keperluan fiskal sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus agar mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan cara *transfer pricing.*

Prosedur akuntansi piutang sangat penting karena hasil pencatatannya akan mempengaruhi besarnya saldo piutang di neraca. Demikian pentingnya catatan piutang maka undang-undang perpajakan mengharuskan agar setiap pembukuan setidak-tidaknya mempunyai daftar piutang dan utang, kas dan bank serta persediaan. Agar pembukuan piutang dapat diperoleh keadaaan mengenai saldo piutang maka rekening piutang khususnya untuk keperluan fiskal harus dapat memberikan keterangan data sebagai berikut :

a. Nama dan alamat lengkap debitur.

b. Jumlah piutang kepada masing-masing debitur.

c. Saat timbul maupun berkurangnya piutang.

d. Jenis piutang.

e. Hak penerimaan bunga.

f. Tanggal jatuh tempo piutang.

g. Jumlah piutang yang dapat dihapuskan.

h. Keterangan lain yang berhubungan dengan piutang.

Piutang dalam mata uang asing harus dibukukan ke dalam mata uang Rupiah. Untuk keperluan perpajakan ada dua jenis nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan piutang dalam mata uang asing yaitu nilai tukar tetap atau nilai tukar pada tanggal neraca berdasarkan pengumuman Bank Indonesia. Adapun untuk akuntansi komersial hanya satu nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkannya, yaitu nilai tukar pada saat tanggal neraca.

2.7. Nilai Piutang di Neraca

Besarnya nilai saldo piutang yang tercantum di neraca ialah nilai piutang neto. Pengertian piutang neto yang harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersil adalah tidak sama. Saldo piutang neto pada neraca fiskal adalah saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Sedangkan saldo piutang neto pada neraca komersil adalah saldo piutang minus piutang ragu-ragu (taksiran piutang yang tidak dapat ditagih).

Khusus piutang dalam hubungan istimewa harus disajikan neto (dalam satu rekening) pada neraca fiskal. Agar penyajiannya lebih jelas, piutang dalam hubungan istimewa yang timbul dari penyerahan barang atau penyerahan jasa dalam usaha normal harus disajikan dalam kelompok ini. Ketentuan ini

dimaksudkan agar setiap pengalihan harta (*transfer pricing)* dapat terlihat terang pada neraca fiskal.

2.8. Metode Penghapusan Piutang

Menurut Warren (1999:327), terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Metode tersebut adalah :

a. Metode Penyisihan (*Allowance Method)*

   Metode ini hanya digunakan dalam akuntansi karena metode ini memperbolehkan piutang yang tidak tertagih dalam satu periode untuk dibebankan sebagai biaya dan mengurangkannya dari penghasilan. Hal ini dilakukan dengan cara membukukan jumlah piutang yang tidak tertagih pada periode yang bersangkutan di sebelah debet rekening biaya piutang yang tidak tertagih dan di sebelah kredit rekening cadangan piutang tidak tertagih. Rekening biaya piutang tidak tertagih akan tampak pada perhitungan rugi laba, sedangkan rekening cadangan piutang tidak tertagih terlihat di neraca.

b. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off method)*

   Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (*direct write-off method)*. Ketentuan pajak lebih mengenal istilah penghapustagihan daripada penghapusbukuan piutang. Jadi, kerugian penghapusan piutang hanya diakui apabila telah diupayakan secara nyata penagihannya. Dalam penjelasan Undang-Undang diberikan contoh upaya nyata, misalnya, berupa penyerahan piutang ke kantor lelang

atau pengadilan. Apabila debiturnya adalah pemegang saham perusahaan yang bersangkutan, penghapusan piutang tersebut bukan faktor pengurang. Sebaliknya jumlah piutang yang dihapuskan itu merupakan deviden yang wajib dipotong Pajak Penghasilan 23 atau Pajak Penghasilan 26.

2.9. Ketentuan Dana Cadangan Menurut Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-21/PJ.42/2000 yang ditetapkan tanggal 12 Juli 2000 mengenai Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK/2000, Bank Perkreditan Rakyat dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih. Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut :

a. 0,5% (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan lancar;
b. 3% (tiga perseratus) dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai;
d. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.

Sedangkan besarnya nilai agunan yang dikuasai yang harus dikurangkan nilai kredit adalah sebagai berikut:

a. Setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari nilai agunan yang bersifat likuid;

b. Setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai

2.10. Perlakuan Akuntansi untuk Piutang

2.10.1 Berdasarkan Metode Penyisihan

Pada saat terjadi transaksi penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit, maka perusahaan akan menjurnal transaksinya sebagai berikut :

Piutang Usaha	xxx	
Penjualan		xxx

Pada akhir periode, perusahaan telah melakukan estimasi untuk sejumlah piutang usaha yang tidak akan tertagih. Jurnal estimasi piutang dibawah ini adalah jurnal penyesuaian pada akhir periode.

Beban piutang tidak tertagih	xxx	
Penyisihan piutang ragu-ragu		xxx

Apabila piutang usaha dapat dipastikan tidak dapat tertagih sama sekali, maka piutang usaha tersebut dihapuskan dari akun penyisihan sebagai berikut :

Penyisihan piutang ragu-ragu	xxx	
Piutang usaha		xxx

Piutang usaha yang telah dihapuskan dari akun penyisihan mungkin saja dapat ditagih di kemudian hari. Jika hal ini terjadi, piutang tersebut harus ditimbulkan kembali dengan ayat jurnal yang merupakan kebalikan dari ayat

jurnal penghapusan. Kas yang diterima sebagai pembayaran harus dicatat sebagai panerimaan pembayaran piutang.

Piutang usaha	xxx	
Penyisihan piutang ragu-ragu		xxx

(untuk menimbulkan kembali piutang yang telah dihapus)

Kas	xxx	
Piutang usaha		xxx

(untuk mencatat penagihan piutang)

2.10.2. Berdasarkan Metode Penghapusan Langsung

Berdasarkan metode penghapusan langsung, beban piutang tidak tertagih tidak dicatat sampai piutang tersebut diputuskan tidak akan tertagih lagi. Jadi, akun penyisihan dan ayat jurnal penyesuaian tidak diperlukan pada akhir periode. Ayat jurnal untuk menghapus piutang yang telah diputuskan tidak akan tertagih lagi adalah sebagai berikut :

Beban piutang tak tertagih	xxx	
Piutang usaha		xxx

Apabila terjadi pembayaran piutang yang telah dihapus, maka piutang itu harus ditimbulkan kembali dengan membalik ayat jurnal penghapusan sebelumnya.

Piutang usaha	xxx	
Beban piutang tak tertagih		xxx

2.11. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang membahas mengenai piutang dalam hubungannya dengan perpajakan antara lain dilakukan oleh Robby S Madjid dengan judul "Perencanaan Pajak Terhadap Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Dalam Upaya untuk Memperoleh Penghematan Pajak di PT BBI Surabaya". Penelitian diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tata cara perencanaan pajak terhadap piutang tang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini dilakukan guna mengetahui tata cara penerapan akuntansi perpajakan yang dilakukan oleh BPR Delta Purnama Sidoarjo terhadap piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Penelitian ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-21/PJ.42/2000 yang ditetapkan tanggal 12 Juli 2000 mengenai Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK/2000 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 3

METODE PENELITIAN

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi yang bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil tersebut. Maka dari itu penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberiartian secara terus menerus terhadap sesuatu, namun penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru (Nazir, 1999: 14).

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa pengetahuan atau objek studi, dimana sulit dilakukan pengukuran pada variable-variabelnya. Alasan dipilihnya metodologi ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yin (1997:1) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan "*bagaimana*" atau "*mengapa*", bila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.
2. Rumusan masalah memiliki pokok pertanyaan seperti '*bagaimana*' dan '*mengapa*'.

3. Penerapan akuntansi pajak terhadap piutang yang tidak tertagih dalam perbankan merupakan hal yang menarik bagi penulis.
4. Penelitian tidak dutujukan untuk menguji hipotesis.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi baik dari subyek penelitian maupun objek penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi pada semua Bank Perkreditan Rakyat, namun terbatas hanya pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama Sidoarjo.

Obyek dari penelitian ini adalah unit analisis penelitian yaitu laporan keuangan (komersil maupun fiskal) serta pos piutang untuk periode tahun 2003.

3.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif

   Data tersebut berupa keadaan dan gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian.

2. Data kuantitatif

   Data tersebut berupa buku besar, laporan keuangan (komersil dan fiskal).

Sedangkan sumber data berasal dari :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang bersangkutan bisa dilakukan dengan cara :

a. Observasi, contohnya observasi terhadap kegiatan pencatatan dan pembukuan pada perusahaan yang bersangkutan.

b. Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan, misalnya Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi dan lain-lain.

2. Data sekunder

Data dari pihak kedua, termasuk dari kepustakaan dan literatur-literatur atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber-sumber yang pendukung.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Yin menegaskan 3 prinsip pengumpulan data yang dapat menjamin validitas konstruk dan realibilitas studi kasus (1997:119-130). Yang dimaksud dengan validitas konstruk ialah menerapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan diteliti. Sedangkan realibilitas berkenaan mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali.

Tiga prinsip pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan multi sumber bukti.

Dengan menggunakan berbagai sumber bukti, temuan konklusi apapun akan lebih menyakinkan, tepat dan lebih menyeluruh karena

memungkinkan adanya proses triangulasi. Penggunaan multi sumber bukti memperkuat validitas konstruk karena tersedianya berbagai ukuran untuk fenomena yang sama.

2. Menciptakan data dasar studi kasus

   Hal ini berkenaan dengan pengorganisasian dan pendokumentasian data yang telah terkumpul. Kedua aktivitas ini dapat mengandung reabilitas karena mengungkapkan bukti yang dapat ditinjau peneliti dengan mudah.

3. Memelihara rangkaian bukti

   Prinsip ini dimaksudkan untuk mempermudah pengamatan dalam lingkup yang lebih luas, misalnya pembaca studi kasus, dalam melacak asal bukti sejak dari pertanyaan awal penelitian hingga konklusi akhir studi kasus dan juga dari konklusi kembali dari pertanyaan awal.

Dengan memperhatikan ketiga prinsip tersebut, berikut ini adalah prosedur pengumpulan data yang digunakan :

1. Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berisi konsep dasar serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Melakukan survei pendahuluan dengan cara mendatangi organisasi yang merupakan subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum dan khusus organisasi yang bersangkutan.

3. Melakukan studi lapangan untuk secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik-teknik yang digunakan adalah :
   a. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sesuai dengan penelitian. Maksudnya adalah untuk mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.
   b. Wawancara, melakukan berbagai macam wawancara baik lisan maupun tulisan yang berupa daftar pertanyaan kepada pihak yang berwenang dalam perusahaan.
   c. Dokumentasi, melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan tahunan, maupun data-data bentuk lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan.

3.5. Teknik Analisis

Pada awalnya penulis melaksanakan penelitian dengan mengadakan survey pendahuluan di lapangan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang kondisi perusahaan dan permasalahannya untuk mendapatkan informasi mengenai akuntansi pajak tentang piutang yang tidak dapat tertagih pada BPR Buduran Delta Purnama.

Setelah data-data yang diperlukan diperoleh dari hasil survey di BPR Buduran Delta Purnama, kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan guna membahas permasalahan yang

dihadapi BPR Buduran Delta Purnama, terutama yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Dari hasil pengumpulan data dan analisa tersebut, kemudian dapat dibuat kesimpulan dan pada akhirnya informasinya dapat diungkapkan dalam laporan keuangan.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data

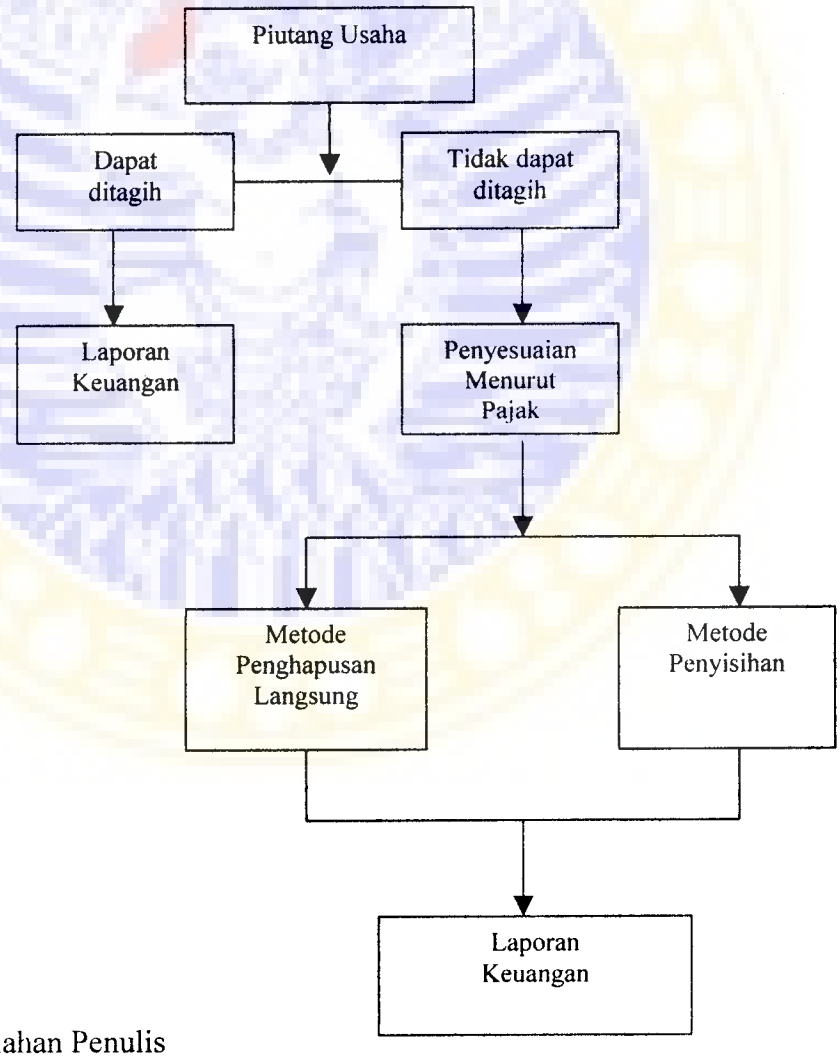

Sumber : Data Olahan Penulis

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat PT. BPR Buduran Delta Purnama.

Pada mulanya H. Seger Gatot Susanto bersama rekan-rekannya telah memiliki beberapa koperasi simpan pinjam yang tersebar diseluruh Jawa Timur. Oleh Departemen Koperasi, pemilik koperasi simpan pinjam dianjurkan untuk membentuk bank perkreditan sesuai dengan imbauan BI.

H. Seger Gatot Susanto dan rekan-rekannya menanggapi secara positif anjuran Departemen Koperasi tersebut. Untuk mewujudkan anjuran tersebut, H. Seger Gatot Susanto melakukan konsultasi dengan PT. Bina Cipta Utama, konsultan perbankan dan manajemen. Setelah melakukan beberapa kali konsultasi akhirnya, H. Seger dibantu pihak konsultan perbankan menyiapkan segala sarana dan prasarana guna mendukung pendirian BPR baru, diantaranya, penyiapan calon karyawan dan manajemen.

Bagi calon karyawan diberikan pendidikan khusus tentang operasional perbankan. Kepada mereka diberikan pula pendidikan manajemen meliputi administrasi, akuntansi dan lain-lainnya.

Pada bulan Februari 1993 dibuatlah akte pendirian PT. BPR Buduran Delta Purnama dihadapan Notaris Ny. Sukarini, SH di Sidoarjo. BPR ini didirikan oleh H. Seger Gatot Susanto bersama H. Suwariyanto dan H. Purnomo dengan modal sebesar Rp. 200 juta.

Dalam anggaran darsar tercantum perincian modal yang disetor sebagai berikut :

	Modal Disetor
H. Seger Gatot Susanto	Rp. 80 juta
H. Suwariyanto	Rp. 60 juta
H. Purnomo	Rp. 60 juta
Total	Rp. 200 juta

Pada bulan Juli, akhirnya keluarlah ijin operasional dari Menkeu melalui Kep.Menkeu RI No.Kep. 153/KM-17/1993 tanggal 16 Juli 1993. dan PT. BPR Buduran Delta Purnama resmi beroperasi pada tanggal 6 September 1993 di Buduran Sidoarjo, Jl.Garuda 379 Sidoarjo.

4.1.1. Bentuk Badan Hukum.

Bentuk hukum PT. BPR Buduran Delta Purnama adalah perseroan terbatas sesuai dengan akte pendiriannya yaitu akte No.13 tanggal 2 Februari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sukarini, SH di Sidoarjo.

4.1.2. Struktur Organisasi Bank.

Dalam menerapkan struktur organisasi yang tepat bagi bank belum tentu juga baik untuk bank lain. Dalam struktur organisasi ini maka setiap bagian mempunyai tugas dan peran serta tanggung jawab masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi PT. BPR Buduran Delta Purnama

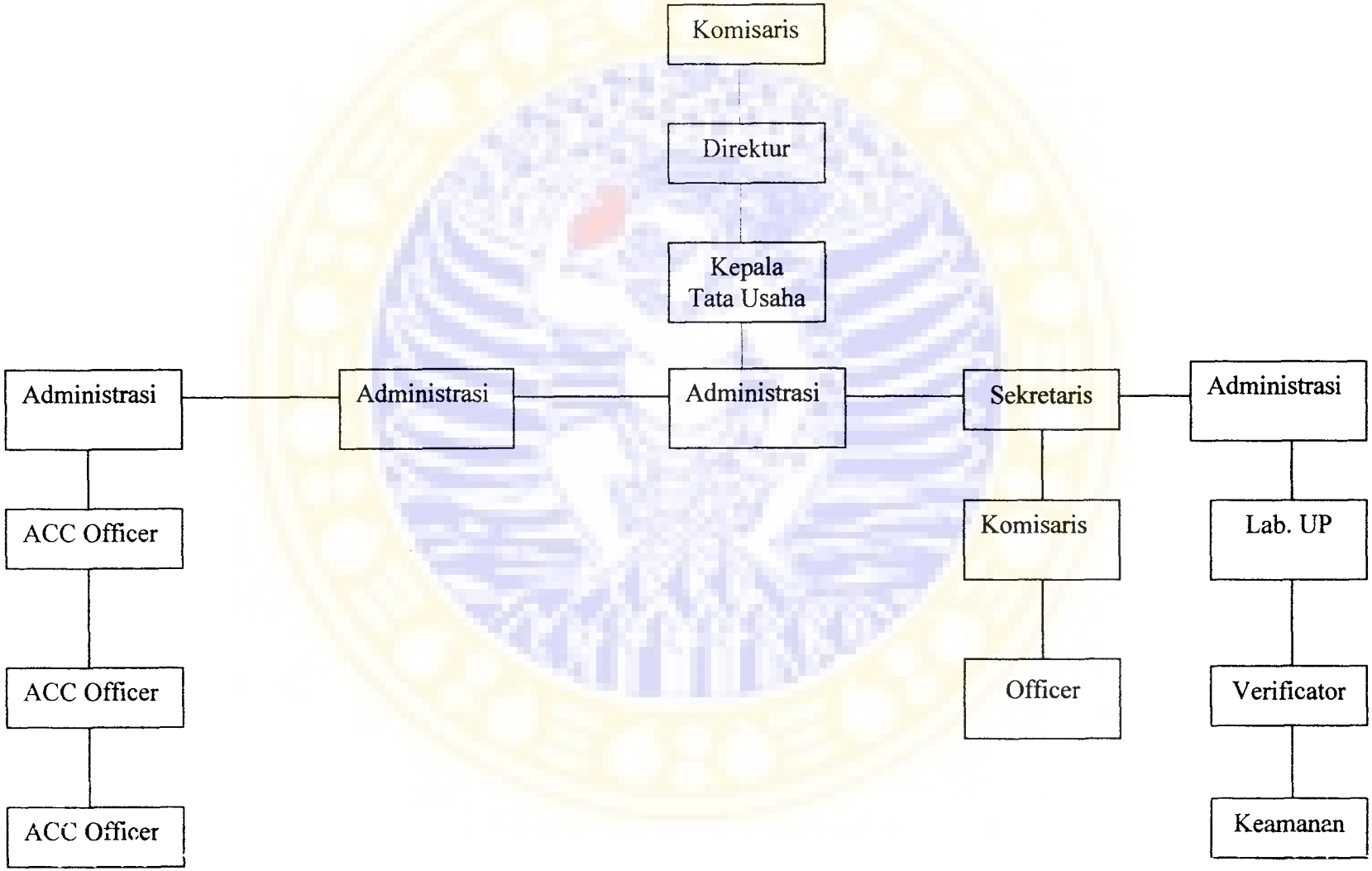

Sumber : Data intern Bank

4.1.4. Job Description PT. BPR BUDURAN DELTA PURNAMA.

1. KOMISARIS.

- Pemegang wewenang tertinggi
- Bertugas menerima laporan kinerja BPR dari direktur

2. DIREKTUR.

- Mewakili perusahaan baik keluar maupun kedalam dan dalam sidang-sidang pengadilan yang ada hubungannya dengan kedinasan.
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan, AD/ART pada rapat pemegang saham dan dalam mengembangkan strategi khusus dibidang perbankan (BPR).
- Mengkoordinir kegiatan kredit/ bisnis bank (BPR).
- Memberikan putusan untuk semua jenis kredit yang dipasarkan ole BPR, sesuai dengan wewenang yang telah diputus oleh Rapat Dewan Komisaris.
- Mengadakan pengawasan langsung terhadap pembukuan maupun keadaan kas BPR.

3. KEPALA TATA USAHA

- Sebagai koordinator aktivitas BPR, dan bertanggungjawab terhadap pengawasan aktivitas kerja disemua bagian atau seksi.
- Membantu direktur dalam menyusun strategi perusahaan.
- Mengerahkan pegawai dalam mencapai tujuan perusahaan dengan penekanan khusus pada kwalitas kredit dan profit.

- Ikut mengatur pelaksanaan administrasi penagihan dan membuat peringatan kepada nasabah.

4. ADMINISTRASI KASIR

- Menyiapkan dan meneliti bukti-bukti kas, kwitansi-kwitansi pengeluaran dan tanda penyetoran serta meneliti kebenaran angka nominal yang ada dalam bukti tersebut.
- Menerima uang setoran dan membayar uang sesuai dengan angka yang tercantum dalam bukti yang teruji kebanarannya.
- Mencatat dan menyimpan surat berharga yang diterima dari nasabah sebagai angsuran pinjaman.
- Menyetor dan mengambil uang sesuai dengan ijin direktur serta bertanggungjawab atas ketepatan jumlah dan pengeluaran uang kas.

5. ADMINISTRASI SIMPANAN

- Melaksanakan pelayanan administrasi dengan membuat kwitansi/bukti penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan tugasnya.
- Menghitung bunga pinjaman secara rutin tiap-tiap akhir bulan maupun secara insidentil,beserta dengan pajaknya.
- Membuat nota-nota pemindah bukuan bunga tabungan dan deposito berjangka yang akan dibayarkan tiap-tiap bulan
- Memasarkan produk tabungan maupun deposito.
- Membuat laporan bulanan ke bank indonesia
- Mengelola register tabungan dan deposito secara tertib dan teratur.

6. ADMINISTRASI KREDIT

- Memberikan pelayanan diloket kredit kepada para nasabah dengan prosedur yang telah ditetapkan, membuat register pinjamam dan register lainnya yang berhubungan dengan administrasi perkreditan serta mengelola dengan tertib dan teratur.
- Memberikan keterangan/ penjelasan yang mudah dimengerti oleh nasabah mengenai prosedur perkreditan.
- Memahami isi dan arti blanko-blanko: surat permohonan kredit, surat-surat kuasa penjualan barang jaminan dan lain-lain.
- Mempersiapkan berkas-berkas realisasi kredit yang akan dibayarkan.
- Melayani para nasabah yang akan membayar angsuran pinjaman
- Membuat laporan bulanan ke BI tentang daftar perincian pinjaman yang diberikan
- Membuat surat teguran/ peringatan kepada para nasabah yang terlambat membayar angsuran pinjaman
- Memastikan kebenaran data-data administrasi dan membuat laporan secara periodik menyangkut daftar nama, alamat, sisa pinjaman, angsuran tunggakan para nasabah yang harus membayar pinjamannya.

7. ACCOUNT OFFICER/ MANTRI

- Membantu tugas-tugas bagian kredit dalam mengadakan pemeriksaan lapangan terhadap nasabah yang melakukan permohonan kredit, serta

membuat analisa keadaan keuangan nasabah sebagai bahan pertimbangan permintaan kreditnya.

- Menunjukkan dengan jelas resiko keuangan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya
- Mengadakan pembinaan para nasabah dilapangan agar jangan sampai timbul tunggakan kredit
- Mengadakan operasi pemberantasan tunggakan dan penagihan secara terus-menerus sampai angka tunggakan kredit dapat di tekan serendah-rendahnya.

4.1.5. Lokasi perusahaan

Lokasi, yaitu keputusan yang dibuat perusahaan terkait dengan dimana operasi dan staff dari BPR. Pentingnya lokasi bagi perusahaan jasa tergantung dari tipe dan derajat interaksi yang terlibat.

Dalam pemilihan lokasi pada BPR Buduran Delta Purnama meliputi pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan ekonomis.

   Artinya bahwa lokasi dari BPR itu sendiri harus strategis agar mudah dijangkau oleh nasabah.

2. Berdasarkan permintaan masyarakat.

   Artinya bahwa lokasi dari BPR ini harus dekat dengan masyarakat yang membutuhkan jasa BPR dan atau atas permintaan Pemerintah Daerah yang menginginkan untuk membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

3. Peluang pasar.

   Artinya bahwa sebelum penentuan lokasi haruslah disurvey terlebih dahulu apakah ada peluang untuk memasarkan jasanya dilokasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, akhirnya BPR Buduran Delta Purnama berdiri di Jl. Garuda No. 379 Buduran Sidoarjo.

4.1.6. Visi, Misi, dan Tujuan BPR Buduran Delta Purnama

BPR Buduran Delta Purnama mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah meningkatkan kesejahteraan ataupun taraf hidup masyarakat sekitar lokasi BPR berada, dengan cara memberikan jasa dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sedangkan misi BPR adalah meningkatkan laba atau profit yang sebesar-besarnya. BPR Buduran Delta Purnama mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek
   a. Meningkatkan jasa.
   b. Mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Jangka Panjang
   a. Menjaga kelangsungan hidup atau kontinuitas perusahaan agar tidak mengalami kerugian atau harus mendapatkan laba serta mampu membiayai seluruh aktivitas perusahaan.
   b. Mengadakan perluasan jangkauan atau jasa.

4.1.7. Jasa Yang Diberikan Oleh BPR Buduran Delta Purnama

BPR Buduran Delta Purnama dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tugas dan kewajiban dari sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu dengan cara :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

4.1.8. Jenis Kredit Yang Diberikan Oleh BPR Buduran Delta Purnama

Dalam kegiatan usahanya, BPR Buduran Delta Purnama memberikan kredit kepada nasabahnya berdasarkan tujuan digunakannya kredit tersebut oleh nasabah dan juga kredit yang berdasarkan jangka waktu pelunasan. Kredit yang berdasarkan tujuan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. **Kredit Modal Kerja,** yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk menambah modal usaha debitur.
2. **Kredit Konsumtif,** yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi nasabah.

Sedangkan kredit yang berdasarkan jangka waktu pelunasannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. **Kredit Jangka Pendek,** yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
2. **Kredit Jangka Menengah,** yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. **Kredit Jangka Panjang,** yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

4.1.9. Tingkat Suku Bunga Kredit

Tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh BPR Buduran Delta Purnama adalah *Flat rate,* yaitu pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode yang lainnya. Walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman. Dibawah ini akan disajikan tabel tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh BPR Buduran Delta Purnama.

TABEL 4.1

TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT

Tingkat Pinjaman	Tingkat Suku Bunga
Sampai dengan Rp. 6.000.000,00	2,5 %
Rp. 6.000.000,00 s/d 20.000.000,00	2,25 %
Diatas 20.000.000,00	2 %

Sumber : Data Intern Perusahaan

TABEL 4.2
NERACA

NAMA BPR	Buduran Delta Purnama
JENIS LAPORAN	Pusat / Cabang / Gabungan
ALAMAT KANTOR	Jl. Garuda No.06 Buduran
LAPORAN PADA AKHIR PERIODE	31-Des-04

Aktiva

No	Akun	Sandi	Jumlah (dalam ribuan Rp)
1	Kas	100	155.411
2	Sertifikat Bank Indonesia	110	0
3	Antar Bank Aktiva (1)	120	3.202.175
4	Kredit Yang Diberikan (2)	130	5.100.134
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	140	(54.264)
6	Aktiva Dalam Valuta Asing	150	0
7	Aktiva Tetap Dan Inventaris		
	a. Tanah dan Gedung	161	0
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung	162	0
	c. Inventaris	165	214.536
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris	166	(139.195)
8	Antar Kantor Aktiva	170	0
9	Rupa-rupa Aktiva (3)	180	64.787
	Jumlah Aktiva	190	8.543.584

Sumber : Data Intern Perusahaan

Keterangan

#) Coret yang tidak perlu

1) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Antar Bank Aktiva
2) Jumlah pos 4 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Kredit yang Diberikan
3) Jumlah pos 9 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rupa-Rupa Aktiva
4) Jumlah pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Tabungan
5) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Deposito Berjangka
6) Jumlah pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Antar Bank Aktiva
7) Jumlah pos 8 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rupa-Rupa Pasiva
8) Jumlah pos 11 b.i harus sama dengan jumlah pada pos 1.1 Laporan L/R
   Jumlah pos 11 b.ii harus sama dengan jumlah pada pos 1.2 Laporan L/R

Pasiva

No	Akun	Sandi	Jumlah (dalam ribuan Rp)
1	Kewajiban yang segera dapat dibayar	200	17.465
2	Tabungan (4)	210	1.991.332
3	Deposito Berjangka (5)	220	0
4	Bank Indonesia	230	0
5	Antar Bank Pasiva (6)	240	0
6	Pinjaman Yang Diterima		
	a. Pinjaman Sub Ordinasi	251	0
	b. Lainnya		
	i. Sampai dengan 3 bulan	256	0
	ii. Lebih dari 3 bulan	257	0
7	Antar Kantor Pasiva	260	0
8	Rupa-rupa Pasiva (7)	270	108.033
9	Modal		
	a. Modal Dasar	281	2.000.000
	b. Modal yang Belum Disetor	282	(1.250.000)
	c. Modal Sumbangan	285	0
	d. Modal Pinjaman	287	0
10	Cadangan		
	a. Cadangan Umum	291	274.844
	b. Cadangan Tujuan	293	0
	c. Laba yang Ditahan	295	3.957.910
11	Laba Tahun Berjalan	307	1.444.000
	Jumlah Pasiva	310	8.543.584

Sumber : Data Intern Perusahaan

TABEL 4.3
LAPORAN LABA RUGI FISKAL

NAMA BPR	Buduran Delta Purnama
JENIS LAPORAN	Pusat / Cabang / Gabungan
ALAMAT KANTOR	Jl. Garuda No.06 Buduran
LAPORAN PADA AKHIR PERIODE	31-Des-04

	Rekening	Sandi	Jumlah (dalam ribuan Rp)
A	Pendapatan Operasional	100	2.521.766
	1. Bunga		
	a. Dari Bank lain-lain		
	i. Giro	112	0
	ii. Tabungan	113	92.427
	iii. Sertifikat Deposito	114	0
	iv. Deposito Berjangka	115	0
	v. Kredit yang Diberikan	116	0
	b. Dari Pihak Ketiga bukan Bank	120	2.220.427
	c. Lainnya	129	54.575
	2. Provisi dan Komisi		
	a. Provosi dan Komisi Kredit	131	73.418
	b. Lainnya	139	80.648
	3. Lainnya	149	271
B	Beban Operasional	150	1.097.146
	1. Bunga		
	a. Kepada Bank Indonesia	161	0
	b. Kepada Bank-Bank lain		
	i. Tabungan	166	0
	ii. Deposito Berjangka	167	0
	iii. Pinjaman yang Diterima	168	0
	iv. Lainnya	169	0
	c. Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
	i. Tabungan	171	213.664
	ii. Deposito Berjangka	172	1.631
	iii. Pinjaman yang Diterima	173	0
	iv. Lainnya	179	0
	2. Premi Asuransi	190	21.566
	3. Tenaga Kerja		
	a. Gaji, Upah, Honor	201	695.037
	b. Biaya Pendidikan	206	5.125
	c. Lainnya	209	0

	4. Sewa	210	8.333
	5. Pajak-Pajak (tak termasuk PPh)	220	2.758
	6. Pemeliharaan dan Perbaikan	230	20.584
	7. Penyusutan / Penghapusan		
	a. Aktiva Produktif	241	34.809
	b. Aktiva Tetap dan Inventaris	243	38.176
	c. Beban yang ditangguhkan	245	0
	8. Barang dan Jasa	250	54.781
	9. Lainnya	269	682
C	1. Laba Operasional (A-B)	270	1.424.620
	2. Rugi Operasional (B-A)	280	0
D	Pendapatan Non Operasional	290	27.282
E	Beban Non Operasional	300	7.902
F	1. Laba Non Operasional (D-E)	310	19.380
	2. Rugi Non Operasional (E-D)	320	0
G	Laba Sebelum Pajak	330	1.444.000

Sumber : Data Intern Perusahaan

Keterangan

2) Jumlah ini harus sama dengan pos 11.b.i pasiva neraca

3) Jumlah ini harus sama dengan pos 11.b.ii pasiva neraca

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Sesuai dengan PSAK No.31, pengertian dari kredit yang diberikan oleh bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan pengertian piutang menurut Lumbantoruan (1996:164), Piutang usaha (*accounts receivable)* ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Perbedaaan antara piutang dengan kredit terletak pada adanya barang ataupun surat berharga lainnya yang dapat dijadikan jaminan atau agunan. Dalam perusahaan yang bergerak didalam bidang perbankan ketika terjadi kesepakatan pinjam meminjam dalam bentuk nominal dengan pihak lain tidak menggunakan istilah piutang melainkan menggunakan istilah kredit.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi BPR Buduran Delta Purnama

Kebijakan Akuntansi BPR Buduran Delta Purnama yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit dan metode penyisihan.

Kredit didalam usaha perbankan harus disajikan dalam neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Sedangkan jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit tersebut. Dalam restrukturisasi kredit, jumlah bruto tersebut

termasuk dengan bunga dan beban lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Oleh BPR Buduran Delta Purnama, kredit digolongkan sebagai salah satu akun aktiva produktif.

Dalam melakukan pencatatan apabila terjadi transaksi pemberian kredit, maka BPR akan menjurnal sebagai berikut :

Pinjaman	xxx	
Kas		xxx

(transaksi pemberian kredit)

Dan apabila ada transaksi pembayaran kredit secara angsuran, BPR akan mencatat

Kas	xxx	
Pinjaman		xxx
Pendapatan Bunga		xxx

(transaksi pembayaran angsuran kredit)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, usaha di bidang perbankan diperkenankan membentuk cadangan piutang tidak tertagih sehingga diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya. BPR Buduran Delta Purnama sendiri dalam menentukan besarnya cadangan piutang tidak tertagih masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.01/1998 yang ditetapkan tanggal 14 April 1998 mengenai perubahan Keputusan Menteri Keuangan 80/KMK.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu sebesar

a. 0,5% (setengah persen) dari kredit yang digolongkan lancar setelah dikurangi nilai agunan.
b. 15% (limabelas persen) dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
c. 50% (limapuluh persen) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
d. 100% (seratus persen) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Khusus untuk kredit lancar, dalam menentukan besar penyisihan piutang yang tidak tertagih, BPR terlebih dahulu menambahkan dengan jumlah aktiva produktif milik BPR yang ada pada bank lain kemudian dikalikan dengan persentase sebesar 0,5%.

Satu ilustrasi diberikan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi BPR Buduran Delta Purnama terhadap penentuan besarnya dana penyisihan kredit yang tidak tertagih. Apabila pada akhir periode pelaporan, BPR telah menetukan besarnya dana penyisihan kredit yang tidak tertagih sebesar Rp. 108.301.700 maka BPR akan menjurnalnya seperti ini :

Beban penyisihan aktiva produktif Rp. 108.301.700

Penyisihan penghapusan aktiva produktif Rp. 108.301.700

(untuk mencatat besarnya dana penyisihan kredit yang tidak tertagih pada akhir periode)

Jumlah seluruh penyisihan kredit yang digolongkan sebagai akun aktiva produktif ini akan dilaporkan pada Neraca BPR pada bagian aktiva dengan saldo bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Sedangkan saldo beban penyisihan penghapusan aktiva produktif akan dilaporkan kedalam Laporan Laba Rugi sebagai salah satu unsur dari Beban penyisihan / penghapusan aktiva produktif.

Yang dimaksud dengan agunan dalam pemberian kredit adalah barang atau surat berharga yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk memperoleh kredit dari bank. Penentuan nilai agunan didasarkan pada nilai likuidasi agunan pada saat pembayaran angsuran kredit yang terakhir. Nilai tersebut ditentukan oleh petugas Account Officer / Mantri dari BPR.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Penerapan Akuntansi Pajak Terhadap Piutang Yang Tidak Tertagih

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu bentuk usaha BPR Buduran Delta Purnama yang sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah memberikan kredit kepada nasabah. Dimana dengan memberikan kredit kepada nasabah, dapat menyebabkan timbulnya resiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut, dan resiko yang terbesar adalah tidak tertagihnya kredit yang diberikan kepada nasabah (biasanya disebut dengan kredit macet). Dengan kata lain bank akan kehilangan sejumlah dana yang diakibatkan oleh usahanya tersebut.

Guna menutupi resiko yang dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabah, usaha perbankan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah

yaitu diperkenankan untuk membentuk cadangan piutang tidak tertagih sehingga diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya. Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 21/PJ.42/2000 yang ditetapkan tangal 12 Juli 2000 mengenai Keputusan Menteri Keuangan No. 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000

Apabila besarnya dana cadangan kredit yang tidak tertagih lebih besar daripada penghapusan kredit yang tidak tertagih maka selisih tersebut harus dibebankan ke laporan rugi laba dan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Tetapi apabila penghapusan kredit yang tidak tertagih lebih besar daripada dana cadangan kredit yang tidak tertagih maka selisih tersebut harus dibebankan sebagai biaya.

TABEL 4.4
DAFTAR RINCIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT BUDURAN DELTA PURNAMA
DESEMBER 31, 2004

NAMA	NILAI AGUNAN	KREDIT YG DIBERIKAN	KOLEK-TIBILITAS	JANGKA WAKTU	ANGSURAN KE	TOTAL ANGSURAN	SALDO AKHIR ANGSURAN
Tn. Fadly F.	14.000.000	6.000.000	1	3 bulan	2	4.000.000	2.000.000
Ny. Siti Nur	8.000.000	3.000.000	2	12 bulan	3	750.000	2.250.000
Tn. Assegaf	40.000.000	20.500.000	1	18 bulan	10	11.389.000	9.111.000
Tn. Sumantoro	16.000.000	7.500.000	1	18 bulan	15	6.250.000	1.250.000
Tn. Ferdianto	9.000.000	4.000.000	3	24 bulan	8	1.333.000	2.667.000
Ny. Harun	10.000.000	4.000.000	1	6 bulan	5	3.333.000	667.000
Ny. Susan	35.000.000	16.500.000	4	12 bulan	4	5.500.000	11.000.000
Tn. Qomar	20.000.000	9.500.000	3	18 bulan	9	4.750.000	4.750.000
Tn. Bambang	13.000.000	6.000.000	3	24 bulan	23	5.714.300	285.700
Tn. Erdiansyah	18.000.000	8.000.000	2	3 bulan	2	5.333.300	2.666.700
Ny. Deasy A.	7.000.000	3.500.000	2	5 bulan	3	2.100.000	1.400.000
Tn. Luffy	5.000.000	3.000.000	1	6 bulan	1	500.000	2.500.000
Ny. Sholeh	12.000.000	13.000.000	3	24 bulan	18	9.750.000	3.250.000
Ny. Namyy	15.000.000	6.000.000	4	6 bulan	4	4.000.000	2.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari ilustrasi tabel 4.4 diatas, untuk kredit dengan tingkat kolektibilitas 1, dapat diambil contoh pada Tn. Assegaf dimana Tn. Assegaf menerima kredit sebesar Rp. 20.500.000, dengan jangka waktu pembayaran selama 18 bulan dengan bunga tiap bulan sebesar 2,25% perbulan dan nilai agunan yang diperkirakan sebesar Rp. 40.000.000. Oleh karena itu BPR menjurnal transaksi tersebut sebagai berikut :

Kredit yang diberikan	Rp. 20.500.000	
Kas		Rp. 20.500.000

(untuk mencatat pemberian kredit)

Kas	Rp. 1.600.150	
Kredit yang diberikan		Rp. 1.138.900
Pendapatan bunga		Rp. 461.250

(untuk mencatat penerimaan pembayaran angsuran kredit beserta bunga setiap bulan)

<u>Perhitungan :</u>

Kredit yang diberikan : Rp. 20.500.000 : 18 bulan = Rp. 1.138.900

Pendapatan bunga : Rp. 20.500.000 x 2,25% = Rp. 461.250

Untuk pembentukan dana cadangan kredit yang tidak tertagih bagi Tn. Assegaf pada akhir bulan, BPR menetapkan sebesar 0,5% dari nilai saldo akhir kredit Tn. Assegaf atau Rp 9.111.000 yaitu sebesar Rp. 45.555. Maka BPR menjurnal pembentukan dana cadangan kredit sebagai berikut :

Beban Penyisihan aktiva produktif	Rp. 45.555	
Penyisihan penghapusan aktiva produktif		Rp. 45.555

Apabila telah dilakukan pelunasan oleh Tn. Assegaf, maka BPR wajib untuk melakukan penghapusan dana cadangan kredit yang tidak tertagih tersebut, sebagai tersebut :

Penyisihan penghapusan aktiva produktif	Rp. 45.555	
Beban penyisihan aktiva produktif		Rp. 45.555

Sedangkan untuk Ny. Susan yang menerima kredit dari BPR sebesar Rp. 16.500.000, dengan jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 2,25%. Dimana Ny. Susan memberikan agunan yang dinilai oleh BPR sebesar Rp. 35.000.000. Maka BPR menjurnal transaksi tersebut sebagai berikut :

Kredit yang diberikan	Rp. 16.500.000	
Kas		Rp. 16.500.000

(untuk mencatat pemberian kredit)

Kas	Rp. 1.746.250	
Kredit yang diberikan		Rp. 1.375.000
Pendapatan bunga		Rp. 371.250

(untuk mencatat penerimaan pembayaran angsuran kredit beserta bunga setiap bulan)

<u>Perhitungan :</u>

Kredit yang diberikan : Rp. 16.500.000 : 18 bulan = Rp. 1.375.000

Pendapatan bunga : Rp. 16.500.000 x 2,25% = Rp. 371.250

Oleh suatu hal tertentu, Ny. Susan digolongkan oleh BPR sebagai salah satu debitur yang termasuk kolektibilitas 4 atau tergolong kredit macet pada saat

nilai saldo akhir kredit Rp. 11.000.000. Untuk pembentukan dana cadangan kredit yang tidak tertagih bagi Ny. Susan, BPR menetapkan sebesar 100% dari nilai saldo akhir kredit Ny. Susan Rp. 11.000.000. BPR akan menjurnal pembentukan dana cadangan kredit sebagai berikut :

Beban Penyisihan aktiva produktif Rp. 11.000.000

Penyisihan penghapusan aktiva produktif Rp. 11.000.000

Ternyata ketika saldo akhir kredit sebesar Rp. 11.000.000, Ny. Susan tidak dapat ditagih lagi, maka penghapusan kredit tersebut dibebankan pada penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penghapusan ini dicatat ke sebelah debet rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif dan ke sebelah kredit rekening kredit yang diberikan.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif Rp. 11.000.000

Kredit yang diberikan Rp. 11.000.000

4.3.2. Besar Dana Penyisihan Penghapusan Kredit Tidak Tertagih

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 21/PJ.42/2000 yang ditetapkan tangal 12 Juli 2000, maka besar dana penyisihan kredit yang tidak tertagih pada BPR selama tahun 2004 adalah sebagai berikut :

<u>Januari</u>

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 3.370.914.800
   : Rp. 16.854.574
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

: 3% x Rp. 366.090.900

: Rp. 10.982.727

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

: 50% x Rp. 340.675.850

: Rp. 170.337.925

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

: 100% x Rp. 16.621.600

: Rp. 16.621.600

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Januari adalah sebesar (Rp. 16.854.574 + Rp. 10.982.727 + Rp. 170.337.925 + Rp. 16.621.600) x 1% = Rp. 2.147.968.

Februari

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar

: 0,5% x Rp. 3.509.599.750

: Rp. 17.547.999

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

: 3% x Rp. 332.349.750

: Rp. 9.970.493

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

: 50% x Rp. 344.655.800

: Rp. 172.327.900

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

: 100% x Rp. 25.189.100

: Rp. 25.189.100

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Februari adalah sebesar (Rp. 17.547.999 + Rp. 9.970.493 + Rp. 172.327.900 + Rp. 25.189.100) x 1% = Rp. 2.250.355

Maret

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 3.605.706.950
   : Rp. 18.028.535
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar
   : 3% x Rp. 317.113.100
   : Rp. 9.513.393
3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan
   : 50% x Rp. 343.420.500
   : Rp. 171.710.250
4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet
   : 100% x Rp. 25.189.100
   : Rp. 25.189.100

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Maret adalah sebesar (Rp. 18.028.535 + Rp. 9.513.393 + Rp. 171.710.250 + Rp. 25.189.100) x 1% = Rp. 2.244.413

April

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 18.352.196

: Rp. 31.952.072

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

: 3% x Rp. 287.793.850

: Rp. 8.633.816

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

: 50% x Rp. 368.495.350

: Rp. 184.247.675

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

: 100% x Rp. 30.449.100

: Rp. 30.449.100

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan April adalah sebesar (Rp. 18.352.196 + Rp. 8.633.816 + Rp. 184.247.675 + Rp. 30.449.100) x 1% = Rp. 2.416.828

Mei

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar

: 0,5% x Rp. 3.804.320.000

: Rp. 19.021.600

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

: 3% x Rp. 259.008.150

: Rp. 7.770.245

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

: 50% x 375.123.900

: Rp. 187.561.950

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

   : 100% x Rp. 33.657.400

   : Rp. 33.657.400

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Mei adalah sebesar (Rp. 19.021.600 + Rp. 7.770.245 + Rp. 187.561.950 + Rp. 33.657.400) x 1% = Rp. 2.480.112

Juni

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar

   : 0,5% x Rp. 3.965.531.550

   : Rp. 19.827.658

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

   : 3% x Rp. 326.584.450

   : Rp. 9.797.534

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

   : 50% x Rp. 427.076.300

   : Rp. 213.538.150

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

   : 100% x Rp. 33.657.400

   : Rp. 33.657.400

Besar dana Penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Juni adalah sebesar (Rp. 19.827.658 + Rp. 9.797.534 + Rp. 213.538.150 + Rp. 33.657.400) x 1% = Rp. 2.768.207

Juli

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 3.980.711.200
   : Rp. 19.903.556
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar
   : 3% x Rp. 255.447.750
   : Rp. 7.663.433
3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan
   : 50% x Rp. 402.532.750
   : Rp. 201.266.375
4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet
   : 100% x Rp. 41.651.950
   : Rp. 41.651.950

Besar dana Penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Juli adalah sebesar (Rp. 19.903.556 + Rp. 7.663.433 + Rp. 201.266.375 + Rp. 41.651.950) x 1% = Rp. 2.704.853

Agustus

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 4.015.565.550
   : Rp. 20.077.828
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar
   : 3% x Rp. 285.424.200
   : Rp. 8.562.726

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan
   : 50% x Rp. 367.306.750
   : Rp. 183.653.375
4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet
   : 100% x Rp. 47.055.250
   : Rp. 47.055.250

Besar dana Penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Agustus adalah sebesar (Rp. 20.077.828 + Rp. 8.562.726 + Rp. 183.653.375 + Rp. 47.055.250) x 1% = Rp. 2.593.492

September

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 4.034.167.550
   : Rp. 20.170.838
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar
   : 3% x Rp. 320.571.900
   : Rp. 9.617.157
3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan
   : 50% x Rp. 364.518.750
   : Rp. 182.259.375
4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet
   : 100% x Rp 47.090.950
   : Rp. 47.090.950

Besar dana Penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan September adalah sebesar (Rp. 20.170.838 + Rp. 9.617.157 + Rp. 182.259.375 + Rp. 47.090.950) x 1% = Rp. 2.591.383

Oktober

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp. 4.186.166.300
   : Rp. 20.930.832
2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar
   : 3% x Rp. 289.165.950
   : Rp. 8.674.979
3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan
   : 50% x Rp 390.268.850
   : Rp. 195.134.425
4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet
   : 100% x Rp. 47.090.950
   : Rp. 47.090.950

Besar dana Penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Oktober adalah sebesar (Rp. 20.930.832 + Rp. 8.674.979 + Rp. 195.134.425 + Rp. 47.090.950) x 1% = Rp. 2.718.312

November

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar
   : 0,5% x Rp 4.216.340.950
   : Rp. 21.081.705

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

   : 3% x Rp. 292.347.750

   : Rp. 8.770.433

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

   : 50% x Rp. 438.674.200

   : Rp. 219.337.100

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

   : 100% x Rp. 51.568.450

   : Rp. 51.568.450

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan November adalah sebesar (Rp. 21.081.705 + Rp. 8.770.433 + Rp. 219.337.100 + Rp. 51.568.450) x 1% = Rp. 3.007.577

Desember

1. Kredit Lancar : 0,5% x Kredit Lancar

   : 0,5% x Rp. 4.374.485.300

   : Rp. 21.872.427

2. Kredit Kurang Lancar : 3% x Kredit Kurang Lancar

   : 3% x Rp. 264.471.950

   : Rp. 7.934159

3. Kredit Diragukan : 50% x Kredit Diragukan

   : 50% x Rp. 411.742.650

   : Rp. 205.871.325

4. Kredit Macet : 100% x Kredit Macet

: 100% x Rp. 49.434.500

: Rp. 49.434.500

Besar dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama bulan Desember adalah sebesar (Rp. 21.872.427 + Rp. 7.934159 + Rp. 205.871.325 + Rp. 49.434.500) x 1% = Rp. 2.851.124

Jadi jumlah total besarnya dana penyisihan piutang yang tidak tertagih selama tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Pembentukan Dana Penyisihan Piutang Yang Tidak Tertagih

Tahun 2004

Bulan	Jumlah
Januari	Rp. 2.147.968
Februari	Rp. 2.250.355
Maret	Rp. 2.244.413
April	Rp. 2.416.828
Mei	Rp. 2.480.112
Juni	Rp. 2.768.207
Juli	Rp. 2.704.853
Agustus	Rp. 2.593.492
September	Rp. 2.591.383
Oktober	Rp. 2.718.312
November	Rp. 3.007.577
Desember	Rp. 2.851.124
Total	**Rp. 30.774.624**

Sumber : Data Olahan Penulis

Jadi berdasarkan tabel 4.5 diatas, maka BPR Buduran Delta Purnama selama tahun 2004 seharusnya membentuk dana penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp. 30.774.624.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Berdasarkan perhitungan diatas, maka berikut ini dilampirkan penyajian laporan laba rugi BPR Buduran Delta Purnama untuk yang berakhir 31 Desember 2004. Dimana dalam laporan tersebut dibedakan antara kebijakan perusahaan yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 204/KMK.04/2000.

TABEL 4.6
LAPORAN LABA RUGI FISKAL

NAMA BPR	Buduran Delta Purnama
JENIS LAPORAN	Pusat / Cabang / Gabungan
ALAMAT KANTOR	Jl. Garuda No.06 Buduran
LAPORAN PADA AKHIR PERIODE	31-Des-04

(dalam ribuan Rp)

	Rekening	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 235/KMK.01/1998	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 204/KMK.04/2000
A	Pendapatan Operasional	2.521.766	2.521.766
	1. Bunga		
	a. Dari Bank lain-lain		
	i. Giro	0	0
	ii. Tabungan	92.427	92.427
	iii. Sertifikat Deposito	0	0
	iv. Deposito Berjangka	0	0
	v. Kredit yang Diberikan	0	0
	b. Dari Pihak Ketiga bukan Bank	2.220.427	2.220.427
	c. Lainnya	54.575	54.575
	2. Provisi dan Komisi		
	a. Provosi dan Komisi Kredit	73.418	73.418
	b. Lainnya	80.648	80.648
	3. Lainnya	271	271
B	Beban Operasional	1.097.146	1.093.111
	1. Bunga		
	a. Kepada Bank Indonesia	0	0
	b. Kepada Bank-Bank lain		
	i. Tabungan	0	0
	ii. Deposito Berjangka	0	0
	iii. Pinjaman yang Diterima	0	0
	iv. Lainnya	0	0
	c. Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
	i. Tabungan	213.664	213.664
	ii. Deposito Berjangka	1.631	1.631
	iii. Pinjaman yang Diterima	0	0
	iv. Lainnya	0	0
	2. Premi Asuransi	21.566	21.566
	3. Tenaga Kerja		
	a. Gaji, Upah, Honor	695.037	695.037
	b. Biaya Pendidikan	5.125	5.125
	c. Lainnya	0	0

	4. Sewa	8.333	8.333
	5. Pajak-Pajak (tak termasuk PPh)	2.758	2.758
	6. Pemeliharaan dan Perbaikan	20.584	20.584
	7. Penyusutan / Penghapusan		
	a. Aktiva Produktif	34.809	30.774
	b. Aktiva Tetap dan Inventaris	38.176	38.176
	c. Beban yang ditangguhkan	0	0
	8. Barang dan Jasa	54.781	54.781
	9. Lainnya	682	682
C	1. Laba Operasional (A-B)	1.424.620	1.428.655
	2. Rugi Operasional (B-A)	0	0
D	Pendapatan Non Operasional	27.282	27.282
E	Beban Non Operasional	7.902	7.902
F	1. Laba Non Operasional (D-E)	19.380	19.380
	2. Rugi Non Operasional (E-D)	0	0
G	Laba Sebelum Pajak	1.444.000	1.448.035

Sumber : Data Olahan Penulis

Keterangan
2) Jumlah ini harus sama dengan pos 11.b.i pasiva neraca
3) Jumlah ini harus sama dengan pos 11.b.ii pasiva neraca

Dari analisa diatas dapat dikeahui bahwa dengan melaksanakan perhitungan besarnya dana cadangan piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 204/KMK.04/2000 akan membuat terjadinya selisih laba sebelum pajak tahun 2004 sebesar Rp. 4.035.000. Selisih ini diperoleh dari perhitungan laba sebelum pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 204/KMK.04/2000 dengan perhitungan laba sebelum pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998. Dengan diketahuinya laba sebelum pajak tahun 2004 yang diterima oleh BPR, maka kemudian dapat dihitung besarnya pajak terhutang yang harus ditanggung oleh BPR. Perhitungan ini dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7

Perhitungan PPh Terhutang

Rekening	Berdasarkan Kep. MenKeu. No. 204/KMK.04/2000
Laba Sebelum Pajak	Rp. 1.448.035.000
Pajak Yang Terhutang	
10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 12.500.000
30% x Rp. 1.348.035.000	Rp. 404.411.000
Total Pajak	Rp. 416.911.000
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 1.031.124.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya pajak terhutang yang seharusnya dibayar BPR pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.

416.911.000, jumlah ini diperoleh dari perhitungan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dikalilkan dengan tarif pajak yang berlaku. Dengan diketahuinya jumlah pajak yang harus dibayar, maka laba besih setelah pajak dapat dihitung. Laba bersih setelah pajak yang diperoleh BPR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 204/KMK.04/2000 adalah sebesar Rp. 1.031.124.000.

TABEL 4.8
NERACA

NAMA BPR	Buduran Delta Purnama
JENIS LAPORAN	Pusat / Cabang / Gabungan
ALAMAT KANTOR	Jl. Garuda No.06 Buduran
LAPORAN PADA AKHIR PERIODE	31-Des-04

Aktiva

jumlah (ribuan Rp.)

No	Akun	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 235/KMK.01/1998	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 204/KMK.04/2000
1	Kas	155.411	155.411
2	Sertifikat Bank Indonesia	0	0
3	Antar Bank Aktiva (1)	3.202.175	3.202.175
4	Kredit Yang Diberikan (2)	5.100.134	5.100.134
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk	(54.264)	(50.229)
6	Aktiva Dalam Valuta Asing	0	0
7	Aktiva Tetap Dan Inventaris		
	a. Tanah dan Gedung	0	0
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung	0	0
	c. Inventaris	214.536	214.536
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris	(139.195)	(139.195)
8	Antar Kantor Aktiva	0	0
9	Rupa-rupa Aktiva (3)	64.787	64.787
	Jumlah Aktiva	8.543.584	8.547.619

Sumber : Data Olahan Penulis

Keterangan

#) Coret yang tidak perlu
1) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Antar Bank Aktiva
2) Jumlah pos 4 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Kredit yang Diberikan
3) Jumlah pos 9 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rupa-Rupa Aktiva
4) Jumlah pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Tabungan
5) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Deposito Berjangka
6) Jumlah pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Antar Bank Aktiva
7) Jumlah pos 8 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rupa-Rupa Pasiva
8) Jumlah pos 11 b.i harus sama dengan jumlah pada pos 1.1 Laporan L/R
Jumlah pos 11 b.ii harus sama dengan jumlah pada pos 1.2 Laporan L/R

Pasiva

jumlah (ribuan Rp.)

No	Akun	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 235/KMK.01/1998	Berdasarkan Kep. MenKeu No. 204/KMK.04/2000
1	Kewajiban yang segera dapat dibayar	17.465	17.465
2	Tabungan (4)	1.991.332	1.991.332
3	Deposito Berjangka (5)	0	0
4	Bank Indonesia	0	0
5	Antar Bank Pasiva (6)	0	0
6	Pinjaman Yang Diterima		
	a. Pinjaman Sub Ordinasi	0	0
	b. Lainnya		
	i. Sampai dengan 3 bulan	0	0
	ii. Lebih dari 3 bulan	0	0
7	Antar Kantor Pasiva	0	0
8	Rupa-rupa Pasiva (7)	108.033	108.033
9	Modal		
	a. Modal Dasar	2.000.000	2.000.000
	b. Modal yang Belum Disetor	(1.250.000)	(1.250.000)
	c. Modal Sumbangan	0	0
	d. Modal Pinjaman	0	0
10	Cadangan		
	a. Cadangan Umum	274.844	274.844
	b. Cadangan Tujuan	0	0
	c. Laba yang Ditahan	3.957.910	3.957.910
11	Laba / Rugi		
	a. Tahun lalu		
	i. Laba	0	0
	ii. Rugi	0	0
	b. Tahun Berjalan		
	i. Laba	1.444.000	1.448.035
	ii. Rugi	0	0
	Jumlah Pasiva	8.543.584	8.547.619

Sumber : Data Olahan Penulis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. BPR Buduran Delta Purnama merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang perbankan, dimana oleh undang-undang perpajakan diperbolehkan menggunakan penyisihan piutang yang tidak tertagih.
2. Pada saat melakukan pemberian kredit kepada debitur, BPR menjurnal transaksi tersebut dengan mencatat akun pinjaman pada sisi debet dan akun kas pada sisi kredit.
3. Dalam menentukan besar dana penyisihan kredit yang tidak tertagih, BPR masih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.01/1998. KepMenKeu ini mempunyai perbedaan persentase penentuan besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 204/KMK.04/2000 BPR semestinya harus menentukan besar dana cadangan pada tahun 2004 sebesar Rp. 30.774.624. Sehingga hal ini akan mengakibatkan laba sebelum pajak yang diperoleh menjadi sebesar Rp. 1.448.035.
4. Khusus untuk kredit lancar, dalam menentukan besar penyisihan piutang tidak tertagih BPR terlebih dahulu menambahkan dengan jumlah aktiva

produktif milik BPR yang ada pada bank lain kemudian dikalikan dengan persentase sebesar 0,5%.

5.2. Saran

Berdasarkan perbandingan antara teori yang diperoleh penulis dalam kuliah dan praktek yang terjadi dalam lapangan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. BPR sebaiknya melakukan pencatatan transaksi pemberian kredit ataupun pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur sesuai dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan.
2. Aktiva produktif yang ada pada bank-bank lain bukanlah termasuk kredit lancar, sehingga tidak perlu ditambahkan dengan kredit lancar untuk menentukan jumlah dana penyisihan kredit yang tidak tertagih.
3. BPR agar lebih aktif untuk mendapatkan informasi akan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

----------. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000.* Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Januari 2001*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 204/KMK.04/2000 *Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.*

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak.* Cetakan kedua (edisi Revisi). Penerbit PT GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta.

Madjid, Robby S. Skripsi "*Perencanaan Pajak terhadap Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Dalam Upaya Melakukan Penghematan Pajak di PT BBI Surabaya*". 2002.

Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian.* Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia.

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Edisi Keempat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan.* Edisi Keempat. Cetakan Kesepuluh. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tjahyono, Ahmad. *Perpajakan.* Edisi dua. Penerbit UPP AMP YKPN, 2000.

Warren. *Prinsip-Prinsip Akuntansi.* Edisi 19. Penerbit Erlangga. 1999.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode).* Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Jumlah
1	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga Kredit yang diberikan	113.341
	b. Bunga lainnya	0
3	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0
4	Penerusan Kredit (Chanelling)	0
5	Aktiva Produktif yang dihapusbukukan	88.376
6	Lain-lain yang bersifat administratif	0

LAMPIRAN II

DAFTAR RINCIAN ANTAR BANK AKTIVA

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III			IV	V	VI
Sandi Bank	Jenis	Jk. Waktu			Kolektibilitas	Suku Bunga Setahun	Jumlah
		Thn	Bln	Hr			
900	20	0	0	0	1	300	1.780.779
900	20	0	0	0	1	375	908.480
900	20	0	0	0	1	500	512.916
Jumlah							3.202.175

LAMPIRAN III

DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III
No	Nama Rekening	Jumlah
1	Pendapatan bunga yang akan diterima	0
2	Pajak yang dibayar dimuka	21.667
3	Beban yang ditangguhkan	0
4	Biaya dibayar dimuka	43.120
5	Agunan yang diambil alih	0
6	Penyediaan dana	0
7	Lainnya	0
	Jumlah	64.787

Jumlah Kolom III harus sama dengan jumlah Pos 9, Aktiva Neraca

LAMPIRAN IV

DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III	IV	V
Jumlah Rekening	Kelompok	Gol. Pemilik	Suku Bunga Per Tahun	Jumlah
1545	10	874	1200	348.200
82	20	874	1200	260.015
17	30	874	1200	114.605
30	40	874	1200	1.268.512
Jumlah				1.991.332

Jumlah Kolom V harus sama dengan Pos 2, Pasiva Neraca

LAMPIRAN V

DAFTAR RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III		IV	V	VI
Jumlah Rekening	Kelompok	Jangka Waktu		Gol. Pemilik	Suku Bunga Setahun	Jumlah
		Tahun	Bulan			
Jumlah						0

Jumlah kolom VI harus sama dengan Pos 3, Pasiva Neraca

LAMPIRAN VI

DAFTAR RINCIAN ANTAR BANK PASIVA

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III			IV	V
Sandi Bank	Jenis	Jangka Waktu			Suku Bunga Setahun	Jumlah
		Thn	Bln	Hari		
Jumlah						0

Jumlah kolom V hrus sama dengan Pos 5, Pasiva Neraca

LAMPIRAN VII

DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA

Nama BPR : Buduran Delta Purnama

Laporan Pada Akhir Periode : 31 Desember 2004

(ribuan Rp.)

I	II	III
No	Nama Rekening	Jumlah
1	Beban bunga yang masih harus dibayar	0
2	Taksiran PPh	67.838
3	Pendapatan diterima dimuka	39.563
4	Penerimaan dana	0
5	Lainnya	632
	Jumlah	108.033

Jumlah kolom III harus sama dengan Pos 8, Pasiva Neraca